



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAHMI FADLI**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **531028**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.106.530.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 4.963 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 99.260.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 462 m2/438 m2 di KAB / KOTA PASER, Rp. 657.270.000
6. Tanah Seluas 450.000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 1.439.000.000**

1. MOTOR, HONDA ACBJ22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, MERCEDES-BENZ C 300 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 235.000.000****D. SURAT BERTAHAPAN****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 521.411.724**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.301.941.724
III. HUTANG	Rp.	1.337.937.082
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.964.004.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.